

Kemiskinan Multidimensi dan Transformasi Kebijakan Publik Berbasis Data dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif di Indonesia

Zaki Al Mubarak^{1*}, Siti Suharlina²

¹Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

²Institut Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo, Indonesia

*e-mail: 1zaki88mubarak@gmail.com, 2suharlina232@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submitted 10 Oktober 2025
Revised 17 Oktober 2025
Accepted 20 November 2025
Published 10 Desember 2025

ABSTRACT

Poverty is a complex development challenge as it is not solely associated with income limitations but also encompasses various forms of deprivation in education, health, living standards, and access to basic services. This study aims to analyze the relationship between the multidimensional poverty approach and data-driven public policy transformation in achieving inclusive development in Indonesia. This research employs a descriptive qualitative design using a literature review and policy analysis approach. The data sources consist of official government documents, national and international development reports, and relevant scientific articles related to multidimensional poverty and evidence-based policymaking. Data were analyzed using content analysis techniques through thematic identification, conceptual categorization, and literature synthesis. The findings indicate that the multidimensional poverty approach provides a more comprehensive understanding of poverty conditions compared to income-based approaches, while the utilization of data in public policymaking improves the accuracy of poverty alleviation program targeting. The integration of these two approaches represents an important strategy for promoting inclusive development through policies that are more adaptive, targeted, and responsive to community needs.

Keywords: Multidimensional Poverty, Data-Driven Policy, Public Policy Transformation, Inclusive Development, Evidence-Based Policy.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan pembangunan yang bersifat kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perumahan, sanitasi, dan partisipasi sosial. Dalam konteks Indonesia, pengentasan kemiskinan menjadi agenda strategis nasional yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 mencapai sekitar 25,22 juta orang atau 9,03% dari total penduduk, menunjukkan adanya penurunan dibandingkan periode sebelumnya, namun masih menggambarkan tantangan besar dalam mencapai pembangunan yang benar-benar inklusif. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Windari & Dewi, 2024), serta berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan nasional menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan, kondisi empiris menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Sebagian masyarakat miskin masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kualitas pendidikan yang rendah, pekerjaan informal dengan pendapatan tidak stabil, serta



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) TANMIYAH: Jurnal Pendidikan dan Sosial.

kerentanan terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat karena individu atau rumah tangga dapat berada di atas garis kemiskinan namun tetap mengalami deprivasi dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun kualitas hidup. Laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) menunjukkan bahwa pendekatan kemiskinan multidimensi mampu memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk keterbatasan yang dialami masyarakat dibandingkan pendekatan moneter semata (Αντωνιάδης dkk., 2019).

Permasalahan kemiskinan multidimensi menjadi semakin penting untuk dikaji karena kegagalan memahami kompleksitas kemiskinan dapat menyebabkan kebijakan publik menjadi kurang efektif dan tidak mampu menjangkau kelompok yang paling rentan. Pendekatan kebijakan yang hanya berorientasi pada bantuan ekonomi jangka pendek berpotensi mengabaikan faktor penyebab kemiskinan yang lebih mendasar, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, serta ketimpangan kesempatan. Secara akademik, kajian mengenai kemiskinan multidimensi berkontribusi dalam memperluas perspektif pembangunan dari paradigma pertumbuhan ekonomi menuju paradigma kesejahteraan manusia (*human development approach*). Secara praktis, pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik kemiskinan diperlukan agar pemerintah dapat menyusun program intervensi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam menjawab tantangan tersebut adalah transformasi kebijakan publik berbasis data (*data-driven public policy*). Pendekatan ini menekankan penggunaan data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar dalam proses identifikasi masalah, perumusan program, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pemanfaatan data mikro seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berbagai sistem informasi sosial memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan kelompok rentan secara lebih presisi. Konsep evidence-based policy menempatkan bukti empiris sebagai dasar utama pengambilan keputusan sehingga kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan antara kemiskinan multidimensi dan efektivitas kebijakan pembangunan. Studi Sabina Alkire, (2017) mengembangkan metode pengukuran kemiskinan multidimensi *Multidimensional Poverty Indeks* (MPI) yang menilai kemiskinan berdasarkan beberapa indikator deprivasi secara simultan. Penelitian Ravallion, (2011) menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan melalui pendekatan multidimensi dapat memberikan informasi tambahan dalam memahami kondisi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, beberapa penelitian mengenai kebijakan publik berbasis data menunjukkan bahwa penggunaan data yang berkualitas dapat meningkatkan ketepatan sasaran program sosial dan mengurangi risiko kesalahan penerima manfaat (*targeting error*) (Dietrich dkk., 2024). Studi-studi tersebut memiliki kesamaan dalam menempatkan data dan indikator multidimensi sebagai instrumen penting dalam pembangunan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek pengukuran kemiskinan atau evaluasi program secara terpisah.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana transformasi kebijakan publik berbasis data dapat diintegrasikan dengan perspektif kemiskinan multidimensi untuk membangun strategi pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia (Azizah dkk., 2025). Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kemiskinan sebagai fenomena ekonomi atau mengukur tingkat deprivasi masyarakat, sementara kajian yang menghubungkan pemanfaatan data, desain kebijakan, dan mekanisme pengambilan keputusan publik secara

menyeluruh masih terbatas (Baihaqi dkk., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis konseptual mengenai hubungan antara pendekatan kemiskinan multidimensi dan transformasi kebijakan publik berbasis data sebagai strategi pembangunan inklusif. Perspektif ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya membutuhkan peningkatan bantuan sosial, tetapi juga reformasi sistem kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan kemiskinan multidimensi dalam mendorong transformasi kebijakan publik berbasis data guna mewujudkan pembangunan inklusif di Indonesia. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana konsep kemiskinan multidimensi dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, bagaimana pemanfaatan data dapat meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah, serta bagaimana strategi tersebut dapat memperkuat pemerataan pembangunan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan berbasis bukti. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan multidimensi merupakan konsep yang memandang kemiskinan sebagai kondisi kekurangan yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan kemampuan individu dalam memperoleh kualitas hidup yang layak (Alkire & Santos, 2013). Pendekatan ini berakar pada perspektif *capability approach* yang dikembangkan oleh Sen (1999), yang menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi ketika seseorang mengalami keterbatasan dalam mencapai fungsi kehidupan (*functionings*) yang bernilai, seperti memperoleh pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Berbeda dengan pendekatan kemiskinan moneter yang hanya mengukur kemampuan ekonomi melalui garis pendapatan atau konsumsi, pendekatan multidimensi melihat kemiskinan sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai bentuk deprivasi yang saling berkaitan. Alkire & Santos, (2014) memperkuat konsep tersebut melalui pengembangan metode *Multidimensional Poverty Index* (MPI), yaitu pendekatan pengukuran kemiskinan yang mengidentifikasi individu atau rumah tangga miskin berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan secara simultan (Sabina Alkire, 2017).

Kemiskinan multidimensi memiliki beberapa dimensi utama yang menjadi indikator dalam mengidentifikasi tingkat deprivasi masyarakat. Menurut (Alkire & Santos, 2014), pengukuran kemiskinan multidimensi umumnya mencakup tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dimensi kesehatan dapat dilihat melalui indikator seperti status gizi dan akses terhadap layanan kesehatan, sedangkan dimensi pendidikan mencakup lama sekolah dan akses terhadap pendidikan dasar. Sementara itu, standar hidup mencakup aspek seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, tempat tinggal layak, serta kepemilikan aset dasar. Dalam konteks Indonesia, karakteristik kemiskinan multidimensi juga berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap layanan publik, keterbatasan kesempatan kerja, serta kerentanan sosial ekonomi akibat perubahan lingkungan ekonomi dan sosial (Nurwati, 2008). Oleh karena itu, pendekatan multidimensi memberikan pemahaman yang lebih luas dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan karena mampu mengidentifikasi akar masalah yang melampaui aspek pendapatan.

2. Transformasi Kebijakan Publik Berbasis Data

Transformasi kebijakan publik berbasis data (*data-driven public policy*) merupakan pendekatan dalam administrasi publik yang menempatkan data, bukti empiris, dan analisis informasi sebagai

dasar utama dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Uzun dkk., 2022). Konsep ini berkembang dari pendekatan *evidence-based policy making* yang menekankan bahwa keputusan pemerintah harus didukung oleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Borga & D'Ambrosio, 2021). Dalam perspektif kebijakan publik modern, penggunaan data memungkinkan pemerintah memahami permasalahan secara lebih akurat, menentukan kelompok sasaran secara tepat, serta mengevaluasi efektivitas suatu program berdasarkan hasil yang terukur (Nasri dkk., 2024). Transformasi ini juga berkaitan dengan perkembangan teknologi digital dan tata kelola pemerintahan (*digital governance*) yang memungkinkan integrasi berbagai sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan publik yang lebih responsif (Giest, 2017).

Mekanisme kebijakan publik berbasis data terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi masalah berbasis data, pengumpulan dan integrasi informasi, analisis bukti, formulasi alternatif kebijakan, implementasi program, serta evaluasi berbasis indikator kinerja (Verstraete dkk., 2021). Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pendekatan ini diwujudkan melalui pemanfaatan data sosial ekonomi masyarakat, sistem informasi kesejahteraan, serta pemetaan kelompok rentan untuk meningkatkan ketepatan sasaran intervensi (Megawati dkk., 2021). Penggunaan data mikro memungkinkan pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah penduduk miskin, tetapi juga memahami karakteristik kemiskinan yang dialami setiap kelompok masyarakat (Nasri dkk., 2024). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan mampu mengurangi kesenjangan dalam distribusi manfaat pembangunan.

3. Hubungan Kemiskinan Multidimensi dan Transformasi Kebijakan Publik Berbasis Data dalam Pembangunan Inklusif

Secara teoretis, kemiskinan multidimensi dan transformasi kebijakan publik berbasis data memiliki hubungan yang erat karena kompleksitas masalah kemiskinan membutuhkan pendekatan kebijakan yang mampu menangkap berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat (Sarkila dkk., 2025). Pendekatan kemiskinan multidimensi menyediakan kerangka analisis untuk memahami berbagai bentuk keterbatasan yang dialami masyarakat, sedangkan kebijakan berbasis data menyediakan instrumen untuk menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Penelitian Cahyadie dkk., (2024) menunjukkan bahwa penggunaan indikator multidimensi mampu membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok rentan secara lebih akurat dibandingkan pendekatan pendapatan tunggal. Sejalan dengan itu, studi mengenai *evidence-based policy* menunjukkan bahwa kualitas data memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas kebijakan sosial karena keputusan yang berbasis bukti dapat mengurangi kesalahan dalam penentuan sasaran program (Liebman, 2017).

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan integrasi antara pengukuran kemiskinan multidimensi dan transformasi kebijakan publik berbasis data. Kemiskinan multidimensi berperan sebagai perspektif analitis untuk mengidentifikasi berbagai bentuk deprivasi masyarakat, sedangkan kebijakan berbasis data berfungsi sebagai pendekatan strategis dalam merancang dan melaksanakan intervensi pembangunan. Integrasi kedua konsep tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan inklusif yang tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, fokus analisis penelitian ini diarahkan pada bagaimana pemanfaatan data dalam kebijakan publik dapat memperkuat strategi pengentasan kemiskinan multidimensi di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*) dan analisis kebijakan untuk mengkaji hubungan antara kemiskinan multidimensi

dan transformasi kebijakan publik berbasis data dalam mewujudkan pembangunan inklusif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konseptual, identifikasi pola kebijakan, serta analisis berbagai dokumen dan literatur terkait fenomena kemiskinan multidimensi serta implementasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Ansari & Arifin, 2026). Konteks penelitian berada pada lingkup pembangunan sosial dan administrasi publik di Indonesia dengan fokus pada kebijakan pengentasan kemiskinan nasional, pemanfaatan data kesejahteraan masyarakat, serta strategi pemerintah dalam meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi dan literatur ilmiah, meliputi publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan *United Nations Development Programme* (UNDP), *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI), regulasi pemerintah terkait pengentasan kemiskinan, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan kriteria inklusi berupa publikasi ilmiah dan laporan resmi yang membahas kemiskinan multidimensi, kebijakan publik berbasis data, pembangunan inklusif, serta diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan (Hasan dkk., 2025). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi akademik dan institusi resmi untuk memastikan konsistensi, relevansi, dan kredibilitas informasi yang dianalisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi dan seleksi sumber, pengkodean tema utama, pengelompokan konsep berdasarkan dimensi kemiskinan multidimensi dan mekanisme kebijakan berbasis data, serta interpretasi hubungan antar konsep untuk menghasilkan sintesis penelitian (Rokhamah dkk., 2024). Hasil analisis digunakan untuk membangun kerangka konseptual mengenai bagaimana transformasi kebijakan publik berbasis data dapat mendukung strategi pengurangan kemiskinan multidimensi di Indonesia. Karena penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen publik dan tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik khusus, namun tetap menerapkan prinsip integritas akademik melalui penggunaan sumber yang valid dan pencantuman referensi secara transparan (Yuniarti dkk., 2023).

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Kemiskinan Multidimensi sebagai Dasar Identifikasi Permasalahan Pembangunan Inklusif

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui indikator ekonomi berupa pendapatan atau pengeluaran rumah tangga, tetapi perlu dilihat melalui pendekatan multidimensi yang mencakup berbagai bentuk keterbatasan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan kajian terhadap Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), ditemukan bahwa meskipun angka kemiskinan moneter Indonesia terus mengalami penurunan, masih terdapat masyarakat yang mengalami deprivasi pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan berdasarkan pendapatan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bukti lain menunjukkan bahwa dimensi pendidikan dan kesehatan masih menjadi faktor dominan dalam membentuk kemiskinan multidimensi. Studi mengenai Indeks Kemiskinan Multidimensi Anak Indonesia menggunakan data Susenas 2020 menemukan bahwa sebesar 28,63% anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi, dengan rata-rata intensitas deprivasi sebesar 40,70% dari 13 indikator yang digunakan (Aulia & Wulansari, 2020). Dimensi pendidikan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap kemiskinan anak yang menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan masih menjadi hambatan utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selain

itu, wilayah seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku menunjukkan tingkat kemiskinan multidimensi yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Pola tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik struktural yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kemampuan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Misalnya, masyarakat di wilayah timur Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, akses air bersih, dan peluang ekonomi. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau menyebabkan distribusi fasilitas publik belum sepenuhnya merata sehingga menciptakan variasi tingkat kesejahteraan antarwilayah.

Temuan tersebut memperkuat teori capability approach yang dikembangkan oleh Winter & Kim, (2020), yang menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketika individu kehilangan kemampuan untuk mencapai kehidupan yang bernilai. Dalam perspektif ini, seseorang tidak hanya miskin karena memiliki pendapatan rendah, tetapi juga karena tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, keamanan, dan partisipasi sosial. Pendekatan Sabina Alkire, (2017) juga menegaskan bahwa kemiskinan harus dianalisis berdasarkan jumlah dan intensitas deprivasi yang dialami masyarakat, bukan hanya berdasarkan satu indikator ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanandita & Tampubolon, (2015), yang menemukan bahwa kemiskinan multidimensi di Indonesia tetap menjadi persoalan meskipun indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Penelitian lainnya mengenai penghitungan MPI di Indonesia juga menunjukkan bahwa penggunaan indikator multidimensi mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan. Namun, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menghubungkan hasil identifikasi kemiskinan multidimensi dengan kebutuhan transformasi sistem kebijakan publik berbasis data.

Kemunculan kemiskinan multidimensi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan pembangunan regional, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pelayanan dasar, dan lemahnya integrasi informasi dalam perencanaan pembangunan (Hanandita & Tampubolon, 2015). Sebagai contoh, tingginya kemiskinan multidimensi anak di Papua menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga, tetapi juga berkaitan dengan faktor struktural seperti lokasi geografis, ketersediaan fasilitas pendidikan, dan kualitas pelayanan publik.

Implikasi temuan pertama menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kesejahteraan. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan, tetapi juga perlu mengurangi bentuk-bentuk deprivasi yang menyebabkan masyarakat tetap rentan. Pendekatan kemiskinan multidimensi dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

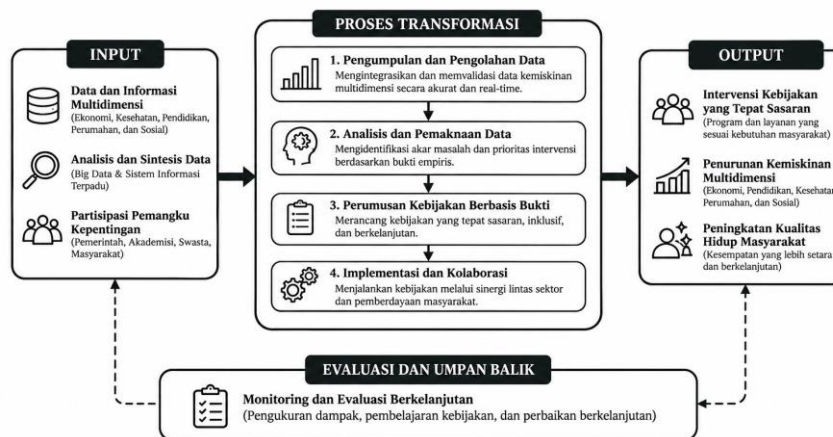
2. Transformasi Kebijakan Publik Berbasis Data dalam Penguatan Intervensi Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan publik berbasis data telah menjadi komponen penting dalam penguatan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem informasi sosial untuk meningkatkan akurasi identifikasi kelompok miskin, salah satunya melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai basis utama berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan sosial lainnya (Pahurrozi dkk., 2021). Berdasarkan data Kementerian Sosial, DTKS mencakup lebih dari 100 juta individu yang menjadi basis pendataan kesejahteraan sosial nasional, meskipun jumlah tersebut mencakup seluruh kelompok yang terdata dan tidak seluruhnya menerima bantuan secara bersamaan.

Program berbasis data telah memberikan dampak terhadap perluasan perlindungan sosial masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, telah menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) secara nasional dalam beberapa tahun terakhir (Noerkaisar, 2021). Program tersebut menggunakan mekanisme pemutakhiran data untuk menentukan keluarga sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Namun, berbagai evaluasi menunjukkan masih terdapat tantangan berupa ketidaktepatan sasaran (*inclusion error dan exclusion error*) (Iping, 2020) akibat perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan keterlambatan pembaruan data.

Figure 1.

Kerangka Transformasi Kebijakan Publik Berbasis Data dalam Pengentasan Kemiskinan Multidimensi



Berdasarkan figure 1 di atas, yang menggambarkan kerangka transformasi kebijakan publik berbasis data dalam pengentasan kemiskinan multidimensi sebagai suatu proses yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, dimulai dari input berupa data dan informasi multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sosial, serta didukung oleh analisis data dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Data tersebut kemudian ditransformasikan melalui empat tahapan utama, yaitu pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan pemaknaan data, perumusan kebijakan berbasis bukti, serta implementasi dan kolaborasi. Kerangka ini menunjukkan bahwa data tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi menjadi dasar dalam mengidentifikasi akar permasalahan, menentukan kelompok prioritas, dan merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, implementasi kebijakan diarahkan untuk menghasilkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penurunan kemiskinan multidimensi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proses tersebut diperkuat melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan sebagai mekanisme umpan balik untuk mengukur dampak, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan kebijakan secara terus-menerus. Dengan demikian, gambar ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan multidimensi memerlukan kebijakan yang berbasis bukti, kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Temuan ini memperkuat konsep *evidence-based policy making* yang menjelaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus didasarkan pada bukti empiris dan analisis yang sistematis (Lentari, 2024). Dalam konteks Indonesia, penggunaan data sosial ekonomi memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan pembangunan secara lebih presisi, terutama dalam menentukan penerima manfaat program pengentasan kemiskinan (Cahyadie dkk., 2024).

Penelitian ini sejalan dengan studi terbaru mengenai pemanfaatan teknologi analitik dalam penargetan kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data spasial dan pembelajaran mesin (*machine learning*) mampu meningkatkan akurasi identifikasi wilayah miskin

serta mengurangi kesalahan penargetan program. Studi tersebut menemukan bahwa pendekatan machine learning mampu mengurangi kesalahan penargetan dibandingkan pendekatan konvensional (Musaddad & Kriswibowo, 2021).

Beberapa faktor yang menyebabkan tantangan implementasi kebijakan berbasis data antara lain perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta kapasitas analisis data yang belum merata di tingkat daerah (Cahyadie dkk., 2024). Selain itu, karakteristik kemiskinan yang dinamis menyebabkan data perlu diperbarui secara berkala agar tetap menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual.

Implikasi temuan kedua menunjukkan bahwa transformasi kebijakan berbasis data harus diarahkan bukan hanya pada digitalisasi sistem administrasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pemerintah dalam membaca dan menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Integrasi data kemiskinan multidimensi dengan sistem kebijakan publik akan meningkatkan efektivitas program serta memperkuat pembangunan yang lebih inklusif.

3. Integrasi Kemiskinan Multidimensi dan Kebijakan Berbasis Data untuk Pembangunan Inklusif

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan kemiskinan multidimensi dan transformasi kebijakan berbasis data merupakan strategi penting dalam memperkuat pembangunan inklusif di Indonesia. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi: kemiskinan multidimensi memberikan kerangka untuk memahami kompleksitas masalah, sedangkan kebijakan berbasis data menyediakan mekanisme untuk menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi tindakan nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang hanya menggunakan indikator pendapatan memiliki keterbatasan dalam menentukan kebutuhan masyarakat secara spesifik (Kakwani & Silber, 2008). Sebaliknya, penggunaan indikator multidimensi memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang mengalami berbagai bentuk keterbatasan secara bersamaan. Ketika informasi tersebut dikombinasikan dengan sistem data yang kuat, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih personal dan sesuai konteks lokal.

Hubungan antara ketiga temuan menunjukkan adanya suatu siklus pembangunan yang saling berkaitan. Identifikasi kemiskinan multidimensi menghasilkan informasi mengenai bentuk deprivasi masyarakat, transformasi kebijakan berbasis data menyediakan mekanisme pengambilan keputusan, sedangkan pembangunan inklusif menjadi tujuan akhir dari proses tersebut. Dengan demikian, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh jumlah program yang dibuat, tetapi oleh kemampuan pemerintah memahami masalah dan merancang solusi berbasis bukti.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat perspektif pembangunan manusia (*human development approach*) yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (Griffin & Knight, 1990). Pendekatan ini juga mendukung teori tata kelola publik modern yang menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan (Dzulkifli dkk., 2023). Kombinasi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa pembangunan inklusif membutuhkan perubahan paradigma dari kebijakan reaktif menuju kebijakan preventif dan berbasis kebutuhan.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya mengenai kemiskinan multidimensi dan kebijakan berbasis data, namun memberikan perluasan dengan mengintegrasikan kedua konsep tersebut dalam konteks pembangunan Indonesia. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengukuran kemiskinan atau efektivitas program tertentu secara terpisah, sedangkan penelitian ini menunjukkan pentingnya hubungan antara sistem pengukuran kemiskinan, tata kelola data, dan proses pengambilan keputusan publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif integratif yang menempatkan kemiskinan multidimensi bukan hanya sebagai alat pengukuran, tetapi sebagai dasar transformasi kebijakan publik berbasis data. Pendekatan ini memberikan kontribusi konseptual bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kombinasi antara pemahaman masalah yang komprehensif dan kemampuan pemerintah dalam mengelola informasi secara strategis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif di Indonesia memerlukan kebijakan yang mampu menjangkau berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder sehingga belum menggambarkan pengalaman langsung masyarakat miskin sebagai penerima kebijakan. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam kajian melalui pendekatan empiris lapangan, analisis data mikro rumah tangga, atau evaluasi program tertentu untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan berbasis data dalam mengurangi kemiskinan multidimensi.

E. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang bersifat multidimensi dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui indikator pendapatan, melainkan mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, standar hidup, serta akses terhadap layanan dasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan kemiskinan multidimensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk deprivasi masyarakat, sedangkan transformasi kebijakan publik berbasis data berperan penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas intervensi pengentasan kemiskinan. Integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi strategi penting dalam mendukung pembangunan inklusif karena memungkinkan kebijakan dirancang berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan, integrasi informasi antarinstansi, serta pemanfaatan data sebagai dasar dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan tidak hanya perlu berorientasi pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi berbagai bentuk keterbatasan yang menyebabkan masyarakat tetap rentan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan pendekatan kajian literatur sehingga belum menggambarkan pengalaman langsung masyarakat penerima kebijakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui survei rumah tangga, studi kasus daerah tertentu, atau analisis data mikro guna mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan berbasis data dalam mengurangi kemiskinan multidimensi secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Alkire, S., & Santos, M. E. (2013). A Multidimensional Approach: Poverty Measurement & Beyond. *Social Indicators Research*, 112(2), 239–257. <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0257-3>
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251–274. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Aulia, L. A., & Wulansari, I. Y. (2020). Pembentukan Indeks Kemiskinan Multidimensi Anak Dan Pemanfaatannya Untuk Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan di Indonesia Tahun 2017.

- Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 336–346.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.222>
- Azizah, G. F., Anwar, R. K., & Winoto, Y. (2025). Pemetaan Arah Riset Global tentang Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Implikasinya bagi Kebijakan Nasional. *Aspirasi Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 16(1), 87–108. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v16i1.4779>
- Baihaqi, I., Cahayasih, A., Khaerunisa, A. F., Chaerunnisa, M., Wildana, M. A., & Lubis, B. O. (2025). Implementasi Algoritma C4.5 Untuk Prediksi Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(2), 2368–2375. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i2.12640>
- Borga, L. G., & D'Ambrosio, C. (2021). Social protection and multidimensional poverty: Lessons from Ethiopia, India and Peru. *World Development*, 147, 105634. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105634>
- Cahyadie, B., Juanda, B., Fauzi, A., & Kinsen, R. A. (2024). Policy framework for updating and utilizing poverty data using MULTIPOL method in Bekasi Regency, Indonesia. *Decision Science Letters*, 13(4), 867–880. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2024.8.005>
- Dietrich, S., Malerba, D., & Gassmann, F. (2024). Predicting social assistance beneficiaries: On the social welfare damage of data biases. *Data & Policy*, 6. <https://doi.org/10.1017/dap.2023.38>
- Dzulkifli, D., Nurdin, N. H., & Purna, Z. A. (2023). Unleashing the Power of Capacity Building: Transforming Governance and Policy Implementation in the Digital Era. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14121>
- Giest, S. (2017). Big data for policymaking: Fad or fasttrack? *Policy Sciences*, 50(3), 367–382. <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9293-1>
- Griffin, K., & Knight, J. B. (1990). *Human development and the international development strategy for the 1990s*. <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19911885039>
- Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2015). Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003–2013). *Social Indicators Research*, 128(2), 559–587. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-1044-0>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://www.google.com/books>
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>
- Kakwani, N., & Silber, J. (2008). *Many Dimensions of Poverty*. Springer.
- Lentari, S. (2024). Evidence-Based Policy Making: Penggunaan Bukti Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Publikauma Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11648>
- Liebman, J. B. (2017). Using Data to More Rapidly Address Difficult U.S. Social Problems. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 675(1), 166–181. <https://doi.org/10.1177/0002716217745812>
- Megawati, S., Rahaju, T., Mahdiannur, M. A., & Kurniawan, B. (2021). Integrated Data-based Poverty Alleviation to Achieve SDGs. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1), 012069. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012069>
- Musaddad, A. A., & Kriswibowo, A. (2021). Optimizing Big Data in Reducing Miss-Targeting Family Hope Program (PKH) in Sidoarjo District with Approach Machine Learning. *IJCCS (Indonesian*

- Journal of Computing and Cybernetics Systems*), 15(1), 99.
<https://doi.org/10.22146/ijccs.62589>
- Nasri, K., Amara, M., & Helmi, I. (2024). Alternative targeting methods for social assistance programs: Evidence from Tunisia. *Social Policy and Administration*, 58(7), 1095–1118.
<https://doi.org/10.1111/spol.13016>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. 10(1), 1.
<http://journal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>
- Pahurrozi, L., Sahri, S., & H.I, R. (2021). Study Of The Implementation Of Poverty Reduction In Central Lombok Regency, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 113(5), 25–33. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-05.03>
- Ravallion, M. (2011). On multidimensional indices of poverty. *The Journal of Economic Inequality*, 9(2), 235–248. <https://doi.org/10.1007/s10888-011-9173-4>
- Rokhamah, R., Yana, P. R., Hernadi, N. A., Rachmawati, F., Irwanto, I., Dey, N. P. H., Purwanti, E. W., Noviana, R., Bawono, Y., & Rianto, R. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. <https://repository.penerbitwidina.com/pt/publications/568101/metode-penelitian-kualitatif-teori-metode-dan-praktik>
- Sabina Alkire, J. F. (2017). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Intellectum (Universidad de La Sabana)*. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Sarkila, A. P., Muliawan, M., & Fadilah, A. A. (2025). Efektivitas Program Perlindungan Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan Multidimensi. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 2(1), 42–61.
<https://doi.org/10.64581/jid.v2i1.120>
- Uzun, M. M., Yıldız, M., & Önder, M. (2022). Big Questions of Artificial Intelligence (AI) in Public Administration and Policy. *Siyasal Journal of Political Sciences*, 31(2), 423–442.
<https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1121900>
- Verstraete, J., Acar, F., Concilio, G., & Pucci, P. (2021). Turning Data into Actionable Policy Insights. Dalam G. Concilio, P. Pucci, L. Raes, & G. Mareels (Ed.), *The Data Shake: Opportunities and Obstacles for Urban Policy Making* (hlm. 73–89). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63693-7_6
- Windari, R. A., & Dewi, Y. K. (2024). Evaluating Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policies and Sustainability Development Goals Achievement in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.81940>
- Winter, T., & Kim, S. (2020). Exploring the relationship between tourism and poverty using the capability approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(10), 1655–1673.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1865385>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Rini, R. S. (2023). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit NEM.
<https://www.google.com/books>
- Αντωνιάδης, Α., Widiarto, I., & Antonarakis, A. S. (2019). Financial crises and the attainment of the SDGs: An adjusted multidimensional poverty approach. *Sustainability Science*, 15(6), 1683–1698. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00771-z>